

**IDENTITAS ISLAM DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI  
INDONESIA TERHADAP PALESTINA, STUDI KASUS :  
PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) LUAR BIASA  
KE-5 TAHUN 2016 ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DI JAKARTA**

**Atep Abdurofiq**

Dosen Tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah  
Jl. Ir. H Juanda No 95 Ciputat Tangerang Selatan/  
e-mail: [atep.abdurofiq@uinjkt.ac.id](mailto:atep.abdurofiq@uinjkt.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah pada the 5<sup>th</sup> Extraordinary Summit Organisation of Islamic Cooperation (OIC) on Palestine and Al-Quds Al-Sharif, di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016. Fakta ini merefleksikan masuknya identitas Islam pada politik luar negeri Indonesia. Makalah ini mengupas hal ini dalam perspektif konstruktivis; perspektif ini memandang bahwa kepentingan dan perilaku Negara dipengaruhi oleh makna identitas nasionalnya. Identitas nasional merupakan pengejawantahan preferensi internal dan eskternal Negara yang bersangkutan. Identitas Islam dikandung dalam kepentingan Indonesia untuk memperoleh pengakuan, kepentingan ekonomi serta perlindungan bagi TKI di negara-negara Timur Tengah.

**Kata kunci:** Identitas, Kepentingan, Kebijakan Luar Negeri

**ABSTRACT**

The Government of the Republic of Indonesia hosted the 5<sup>th</sup> Extraordinary Summit Organisation of Islamic Cooperation (OIC) on Palestine and Al-Quds Al-Sharif in Jakarta on March 7, 2016. The event reflects the Islamic identity in Indonesia's foreign policy. The event is analyzed by the constructivist perspective. In constructivist perspective, interests and State's behavior are influenced by the meaning States's identity. The identity is the result of a State's internal and external preference. Islamic identity embodied in Indonesia's interests to get recognition, economic interests and the protection of Indonesian Workers in Middle East Countries.

**Keywords:** Identity, Interests, Foreign Policy

## 1. PENDAHULUAN

Luas wilayah, letak geografis, jumlah penduduk, serta potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat menjadikan Indonesia mampu memainkan peranan yang lebih besar dalam hubungan internasional di masa depan jika dibandingkan dengan saat ini khususnya mengenai permasalahan Palestina. Mandat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia harus mempunyai orientasi "*outward looking*" seperti dalam kalimat berikut: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Pembukaan UUD 1945 tersebut mengilhami Presiden terpilih Joko Widodo mempunyai arah kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina seperti yang ia sampaikan dalam debat capres dan cawapres pada bulan Juni 2014 lalu. Dalam konteks hubungan internasional, sikap Presiden terpilih tersebut merupakan cerminan tindakan atau gagasan yang akan dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.

Gagasan dan tindakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia salah satunya dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016 untuk menanggapi permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. KTT didahului dengan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan Persiapan Tingkat Menteri pada 6 Maret 2016. KTT yang bertajuk: "*United for a Just Solution*" (Bersatu untuk Sebuah Solusi yang Adil) ini merespon situasi mengkhawatirkan dan mendesak di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, yang tidak hanya mempengaruhi rakyat Palestina melainkan juga umat Islam di seluruh dunia. Konferensi ini akan menjajaki pendekatan terobosan dan strategi untuk menjawab pendudukan ilegal dan kebijakan apartheid oleh pemerintah Israel; mempercepat proses perdamaian; dan mengatasi situasi di Al-Quds Al-Sharif. KTT ini diharapkan menghasilkan sebuah Resolusi yang akan menegaskan kembali posisi prinsip negara-negara anggota OKI mengenai isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Deklarasi Jakarta yang akan berisi komitmen para pemimpin negara anggota OKI untuk mengejar langkah-langkah konkret dalam upaya mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. (Tentang KTT Luar Biasa Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif melalui [<https://www.oic-es2016.id/?p=about>] <28/02/2016>).

Fenomena di atas tentunya menarik untuk dikaji, mengingat perilaku sebuah negara yang terwujud dalam kebijakan luar negeri mencerminkan kepentingan nasionalnya, namun dalam makalah ini kepentingan nasional

tidak dalam konteks realis, namun dalam konteks perspektif konstruktivis dimana kepentingan sebuah Negara dipengaruhi oleh identitas, pemikir konstruktivis melihat lebih dalam mengenai kepentingan, dimana identitas merupakan asal mula dari kepentingan tersebut. Makalah ini berusaha untuk menganalisis bagaimana identitas mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina dalam konteks penyelenggaraan KTT luar biasa OKI di Jakarta. Struktur pembahasan akan diawali dari teori konstruktivis, profil kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina, profil OKI serta identitas dan kepentingan Indonesia terhadap Palestina serta diakhiri dengan bagian penutup.

## **2. TEORI KONSTRUKTIVIS**

Kaum konstruktivis berpendapat bahwa penting untuk memahami bagaimana aktor-aktor mengembangkan kepentingan mereka serta menjelaskan fenomena politik internasional. Konstruktivis pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional merupakan hasil dari suatu “konstruksi sosial”, yakni adanya proses dialektika antara “struktur” dengan “agen/aktor”, di mana lingkungan sosial-politik dan aktor saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik. Esensi dari pemikiran konstruktivis yakni : 1) Penekanan pada aspek agen/aktor yang menentukan struktur. 2) Menekankan pada interaksi antara agen dan struktur. 3) Kepentingan tidak menentukan perilaku, tetapi konstruksi sosial yang mempengaruhi atau menghasilkan kepentingan. Perspektif konstruktivis dibangun atas tiga proposisi. Pertama, struktur sebagai pembentuk perilaku aktor, baik individual maupun negara. Menurut konstruktivis bahwa gagasan, keyakinan dan nilai mempunyai karakteristik struktural yang memberikan pengaruh kuat pada tindakan sosial dan politik. Dalam proses saling mempengaruhi tersebut kemudian membentuk “*collective meanings*” yang menjadi dasar terbentuknya intersubektivitas (kesamaan pandangan) dan kemudian membentuk struktur yang pada akhirnya mengatur tindakan negara. Kedua, konstruktivis berpendapat bahwa pemahaman bagaimana non-materi berupa identitas sosial penting, karena identitas menginformasikan kepentingan dan pada gilirannya tindakan. Konstruktivis dalam hal ini lebih menekankan pada sumber-sumber munculnya kepentingan. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander Wendt bahwa “*identity are the basic of interest*”. Ketiga, struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Meskipun sangat menentukan identitas dan kepentingan aktor-aktor politik, struktur ideasional atau normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan dari para aktor politik. Struktur normatif memegang peranan penting dalam konstruktivis, terutama dalam membentuk identitas aksi

politik dan hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur (Burchill et al, 2005: 195-196).

### **2.1. Identitas**

Diskursus mengenai konsep identitas dalam sebuah perspektif mulai mengemuka sebagai pendekatan dalam analisa kebijakan luar negeri pada awal tahun 1990-an, bersamaan dengan meningkatnya popularitas teori konstruktivis dalam studi Hubungan Internasional (Renner&Horelt, 2008: 9). Jika kita melihat lebih jauh, dalam teori konstruktivis, terdapat berbagai cabang pemikiran yang pada akhirnya menghasilkan pengertian yang berbeda pada konsep identitas. Secara umum, Wendt mendefinisikan konsep identitas sebagai, pada dasarnya, adalah sebuah kualitas subyektif atau sebuah level, unit yang berakar dari *self-understanding* aktor tersebut. Pada dasarnya identitas menjawab pertanyaan mengenai “siapa” dalam hubungan internasional. Apabila sebuah aktor atau agen mengetahui jatid dirinya, maka aktor tersebut kemudian akan dapat mengetahui apa yang diinginkan dan bagaimana aktor tersebut dapat mewujudkannya melalui kapabilitas yang dimilikinya. Namun Wendt juga menekankan bahwa identitas yang hanya dipahami secara pribadi oleh aktor tersebut tidak akan bisa dijadikan variabel dalam analisa hubungan internasional. Agar konsep identitas menjadi valid, pandangan terhadap konsep tersebut harus menjadi pandangan bersama (kolektif) bagi aktor yang terlibat.

Wendt dalam karyanya melihat identitas dalam dua hal. Pertama identitas yang terbentuk secara internal, identitas dalam konteks ini terbentuk melalui sejarah dan nilai-nilai yang bersumber dari peradaban bangsa tersebut, dengan kata lain, identitas tersebut bersifat melekat dan hanya dapat dipahami secara internal oleh bangsa tersebut. Konsep identitas kedua adalah identitas yang terbentuk secara eksternal melalui interaksi sosial antar negara. Identitas inilah yang menjadi variabel utama dalam analisa fenomena hubungan internasional, dimana identitas muncul dalam relasinya dengan aktor lain (Thorun, 2009: 228). Dari bahasan mengenai identitas, kita dapat melihat bahwa suatu negara dapat memiliki berbagai macam identitas yang saling berdampingan. Berbagai macam identitas ini terbentuk akibat berbagai macam interaksi dengan berbagai macam aktor. Berbagai macam interpretasi identitas inilah yang kemudian saling berkompetisi dan mencoba mendominasi suatu aktor (Wendt, 1994: 385).

### **2.2. Kepentingan dan Identitas**

Untuk memahami hubungan antara identitas dan kepentingan (interest), perlu diketahui bahwa pendekatan analisa berbasis identitas terbentuk dari kritik kaum konstruktivis terhadap pendekatan rasionalis kaum realis (Renner&Horelt, 2008: 9). Kaum realis menganggap bahwa kebijakan luar

negeri suatu negara didasari atau dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat tetap (*fixed interest*). Kelemahan yang ada dalam argumen tersebut terletak pada fakta bahwa kepentingan suatu negara tidak akan selalu bersifat tetap tetapi dinamis. Menurut Wendt kepentingan itu tidak muncul begitu saja secara sendirinya (*given exogenously*). Kepentingan tercipta melalui pemahaman suatu negara terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain melalui identitas. Identitas merupakan sumber yang mempengaruhi kepentingan, dan kepentingan merupakan sumber dasar kebijakan luar negeri sebuah Negara (Wendt, 1994: 384). Identitas membentuk kepentingan negara, dimana identitas tersebut bersifat dinamis dan terbentuk melalui interaksi sosial. Kepentingan berfungsi sebagai variabel penghubung antara identitas dan kebijakan luar negeri.

### **3. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PALESTINA**

Kebijakan luar negeri menurut Olton dan Plano (1978:127) adalah “*a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goal defined in terms of national interest*”. Pada konteks Indonesia, definisi kebijakan luar negeri disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang dijelaskan sebagai kebijakan, sikap, dan langkah dari Pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan atau menanggapi suatu masalah maupun memberikan tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungan internasional yang dapat dilakukan dengan menyatakan suatu kebijakan, sikap bahkan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu guna mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Secara singkat kebijakan luar negeri adalah cerminan dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh berbagai situasi dalam komunitas internasional. Menurut Held (1995: 64) terdapat tiga elemen yang mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara : pertama, kondisi atau sistem eksternal – internasional; kedua, kondisi atau sistem internal – domestik; dan ketiga, aktor pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

Indonesia ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan dunia secara damai. Penyelesaian Timur Tengah seperti perang Israel-Palestina secara tidak langsung juga menyangkut kepentingan Indonesia, antara lain bahwa Indonesia dan Timur Tengah sama-sama anggota gerakan Non-Blok, OKI,

OPEC. Dan dalam sejarah, negara-negara Timur Tengah tergolong pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mendukung ketika pada 5 November 1956 dinyatakan bahwa PBB akan membentuk pasukan untuk memelihara keamanan dan mengawasi penghentian tindakan permusuhan di Timur Tengah (Djalal, 1990: 251-254).

Dalam kesempatan itu, Indonesia untuk pertama kalinya ikut ambil bagian dalam misi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (UNEF) untuk Timur Tengah dengan mengirimkan Pasukan Garuda 1. Partisipasi dalam UNEF ini merupakan sumbangan bangsa Indonesia sebagai solidaritas dengan negara-negara Timur Tengah khususnya dan Asia-Afrika umumnya. Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah dan Afrika juga memberikan dukungan besar mereka kepada perjuangan Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Kenyataan ini bukan hanya semakin meningkatkan dan memperkuat solidaritas di antara mereka, tetapi juga memperlihatkan timbal balik yang saling menguntungkan (Abdulgani, 1978: 40).

Indonesia juga mendukung Resolusi Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 194 tentang isu Palestina. Resolusi ini dikeluarkan pada 11 Desember 1948 yang berbunyi: Majelis Umum menegaskan bahwa harus diizinkan secepat mungkin bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangganya, dan demikian juga harus mendapat ganti rugi dari harta benda yang ditinggalkan, dan mendapat ganti rugi dari kerugian atau kerusakan harta benda sesuai dengan hukum internasional dan standar keadilan bagi mereka yang tidak ingin kembali lagi (Rahmat, 2002: 274). Resolusi ini mempunyai dampak positif sangat besar bagi orang-orang Palestina yang meninggalkan kampung halamannya pada saat itu karena keadaan sangat darurat; berbahaya apabila tidak keluar dari kampungnya. Oleh karena itu Indonesia sangat setuju atas dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB yang memberikan hak-haknya atas rakyat Palestina.

Indonesia dari waktu ke waktu tetap memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina meskipun terjadi pergantian rezim di Indonesia. Bukti dukungan terkini dari Indonesia terhadap Palestina terlihat dari penyelenggaraan KTT luar biasa OKI di Jakarta pada bulan Maret 2016.

Penyelenggaraan KTT tersebut didasari oleh permintaan Palestina, hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Pemerintah RI dengan menyampaikan kesiapan untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta, tanggal 7 Maret 2016. Rangkaian KTT diawali oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi (SOM) dan tingkat Menteri (KTM) pada tanggal 6 Maret 2016. Penyelenggaraan KTT tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam Pemerintah RI atas perkembangan situasi di Palestina dan Al-Quds Al-Syarif yang terus memburuk. Eskalasi kekerasan terhadap warga Palestina serta

pembatasan akses beribadah yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Al-Quds Al-Syarif masih berlanjut. Pemerintah RI juga prihatin dengan perkembangan situasi politik dan keamanan di Timur Tengah yang semakin menggeser isu Palestina dari perhatian masyarakat internasional. KTT OKI ini bertujuan untuk memperkuat dukungan OKI terhadap penyelesaian Palestina dan Al-Quds Al-Syarif sebagai isu prioritas dunia Islam. KTT diharapkan pula dapat mencari strategi terobosan untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah yang selama ini tertunda dan berlarut-larut. (Indonesia akan Gelar KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif melalui [<http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-akan-gelar-KTT-Luar-Biasa-OKI.aspx>] <28/02/2016>).

Al-Quds Al-Syarif merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian khusus OKI. Komite Al-Quds OKI yang didirikan pada tahun 1975 diberikan mandat untuk mengimplementasikan seluruh resolusi berkenaan dengan konflik Arab-Israel, khususnya terkait dengan Al-Quds. Komite Al-Quds diketuai oleh Raja Maroko dan terdiri dari 16 negara anggota, termasuk Indonesia. KTT Luar Biasa OKI ke-5 ini merupakan KTT pertama yang mengangkat secara khusus isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. KTT dihadiri oleh 55 negara anggota OKI dan 4 negara pengamat (observer) OKI. Selain menghasilkan sebuah resolusi yang memuat pernyataan politik negara anggota OKI, KTT juga mencanangkan Jakarta Declaration yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Syarif. Kedua dokumen penting tersebut disiapkan oleh Indonesia selaku negara tuan rumah dan Palestina. Pemerintah RI telah secara konsisten berada pada garda terdepan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Selain merupakan elemen penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, dukungan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari amanat UUD 1945 yang menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. (Indonesia akan Gelar KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif melalui [<http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-akan-gelar-KTT-Luar-Biasa-OKI.aspx>] <28/02/2016>).

#### **4. ORGANISASI KERJASAMA ISLAM**

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan

menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds. Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :

- Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.
- Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.
- Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.
- Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka peninjauan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.
- Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Masjid Al Aqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.

Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Masjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel, dari KTT inilah Organisasi Konferensi Islam berdiri (Sihbudi, 2007).

OKI saat ini merupakan institusi Islam yang paling utama dengan 57 anggota yang perannya menonjol dalam politik global. Meskipun anggotanya sangat besar OKI mempunyai tujuan politik yang jelas, secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia



muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek (Sihbudi, 2007). Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu :

- a. Memperkuat/memperkokoh :
  - 1). Solidaritas diantara negara anggota;
  - 2). Kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.
  - 3). Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.
- b. Aksi bersama untuk :
  - 1). Melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
  - 2). Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.
- c. Bekerjasama untuk :
  - 1). Menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;
  - 2). Menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.

## **5. IDENTITAS DAN KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP PALESTINA**

### **5.1. Identitas**

Indonesia saat ini sedang melakukan berbagai upaya guna meningkatkan perannya sebagai aktor regional dan negara pemain tengah yang terkadang masih lemah kapasitas internalnya karena problem domestik. Kebijakan luar negeri Indonesia mencakup beberapa hal, seperti kemitraan strategis, diplomasi ekonomi, penyelesaian perbatasan, perlindungan tenaga kerja Indonesia, penyelesaian tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, kepedulian Indonesia terhadap negara-negara tertinggal di Asia Tenggara, keanggotaan Indonesia dalam forum regional dan internasional (ASEAN, APEC, WTO, dan G-20), peningkatan potensi pasar nontradisional bagi Indonesia di Afrika, dan membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya serta masalah kemerdekaan Palestina.

David Mc Rae (2014) menganalisis empat karakteristik utama kebijakan luar negeri Indonesia, sebagai berikut:

1. Memproyeksikan diri sebagai kekuatan besar Indonesia, meskipun sejatinya masih termasuk dalam kekuatan menengah dunia;
2. Indonesia tetap pada prinsip utama bahwa sebagai negara yang bebas keberpihakan atau non-blok, namun condong ke Amerika Serikat;
3. ASEAN akan terus menjadi platform utama bagi aspirasi regional dan internasional Indonesia;

4. Akan lebih memperhatikan Muslim dari pada mempunyai kebijakan luar negeri Islam yang jelas. (Dave McRae, "More Talk Than Walk: Indonesia as A Foreign Policy Actor, melalui [[http://www.lowyinstitute.org/files/mcrae\\_more\\_talk\\_web\\_0.pdf](http://www.lowyinstitute.org/files/mcrae_more_talk_web_0.pdf)] <28/02/2016>).

Dari poin keempat yang disampaikan Mc Rae, menunjukkan bahwa dalam kebijakan luar negeri Indonesia diwarnai oleh identitas Islam.

Hal tersebut diperkuat oleh Rizal Sukma bahwa salah satu variabel dalam kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah Islam, yang menonjol karena Indonesia mempromosikan dirinya sebagai negara Muslim moderat. Dengan mendefinisikan Islam di Indonesia sebagai sebuah kekuatan bagi perdamaian, toleransi dan harmoni. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengartikulasikan Islam sebagai suara moderat antara dunia Muslim dan dunia lainnya serta di dalam dunia Muslim itu sendiri. Untuk memproyeksikan gambaran itu, Menteri Luar Negeri RI mengangkat serangkaian inisiatif yang berusaha untuk memasukkan Islam ke dalam kebijakan luar negeri. Sebagai contoh, adalah penyelenggaraan KTT luar biasa OKI di Jakarta. Masuknya Islam ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia sekarang ini mengharuskan suatu perilaku penyeimbangan yang rumit. Sebagai segmen dari komunitas Muslim, Indonesia dituntut untuk mengidentifikasi dirinya terhadap dunia Muslim-Arab. (Indonesia Menjadi Model Bagi Hubungan Islam dan Demokrasi melalui [[www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/169-maret-2012/1368-indonesia-menjadi-model-bagi-hubungan-islam-dan-demokrasi.html](http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/169-maret-2012/1368-indonesia-menjadi-model-bagi-hubungan-islam-dan-demokrasi.html)] <28/02/2016>).

Indonesia juga merupakan rumah bagi organisasi Islam dengan jumlah keanggotaan terbesar di dunia. (Warga Nahdlatul Ulama, [<http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,9-t,basis+pendukung-.phpx.>] <28/02/2016>).

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan untuk mempertahankan kepercayaan Islam tradisional yang dipraktekkan oleh ulama-ulama konservatif sebagai reaksi terhadap meningkatnya pengaruh gerakan Islam modernis yang diusung oleh Muhammadiyah—organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah NU - yang telah terlebih dahulu terbentuk, yakni pada tahun 1912 (Fox, 2004: 4). Identitas Islam juga tercermin dalam pidato Presiden Joko Widodo pada COP21 di Paris Perancis yang menyampaikan duka cita atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015, yang menelan korban sipil yang tidak berdosa. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menegaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian. Islam mengajarkan toleransi. Tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa dan ras apapun. (Isi Pidato Lengkap Jokowi di COP21 Paris

melalui [<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723604/ini-isi-pidato-lengkap-jokowi-di-cop21-paris>] <28/02/2015>).

Identitas Islam tersebut diimplementasikan dalam wujud dukungan terhadap Palestina yang merupakan utang yang harus dibayarkan para pendiri Republik mengingat bangsa Palestina termasuk pihak pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan penerimaan Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini yang menerima kedatangan Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia di tahun pertama deklarasi kemerdekaan. Keberpihakan Indonesia terhadap rakyat Palestina menjadi nyata sejak pertama kali Israel memproklamasikan diri pada tanggal 14 Mei 1948, yaitu dengan menolak mengakui kemerdekaannya karena merampas tanah rakyat Palestina. Ucapan selamat dan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang dikirimkan Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Ben Gurion tak ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia. Pasca kemerdekaan, melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Bung Karno lantas mendorong kemerdekaan bagi negara-negara di Asia-Afrika, termasuk Palestina. (Jalan Panjang dukungan RI untuk Kemerdekaan Palestina melalui [<http://www.presidentri.go.id/internasional/jalan-panjang-dukungan-ri-untuk-kemerdekaan-palestina.html>] <28/02/2015>).

Sejumlah negara di Asia-Afrika yang kemudian memproklamirkan kemerdekaannya, antara lain Sudan, Maroko, Ghana, Togo, Kongo, Mali, Nigeria dan Yaman Utara. Di sini, Bung Karno mengirimkan sinyal yang jelas tentang dukungan pada kemerdekaan Palestina dengan menolak partisipasi Israel dan sebaliknya menghadirkan pejuang Palestina, Yasser Arafat. Palestina memang belum merdeka setelah itu, dan hingga saat ini. Namun sikap dukungan kepada Palestina telah ditunjukkan Bung Karno dalam pidatonya pada tahun 1962: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.” Selepas kepemimpinan Bung Karno, mulai dari era Presiden Soeharto hingga kini Presiden Jokowi, Indonesia terus mendukung penuh kemerdekaan Rakyat Palestina. Upaya menggalang dukungan kerja sama Selatan-Selatan untuk mendukung kemerdekaan Palestina pun dikumandangkan Presiden Jokowi dalam peringatan 60 tahun KAA pada bulan April 2015. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur (The Second Conference of Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development, CEAPAD II) di Jakarta di bulan Maret 2014 menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. “Kita menantikan pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, serta sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.” (Jalan Panjang dukungan RI untuk Kemerdekaan Palestina melalui

[<http://www.presidentri.go.id/internasional/jalan-panjang-dukungan-ri-untuk-kemerdekaan-palestina.html>] <28/02/2015>).

Melalui pidatonya di Gedung DPR MPR pada tanggal 14 Agustus 2015, Presiden Jokowi telah menyerukan agar Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden juga menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai. Tak berhenti di situ, dalam pertemuan tingkat regional ASEAN, isu ini terus diangkat. “Saya ingin mendorong agar ASEAN dan AS terus dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah Palestina,” tutur Presiden Jokowi saat menghadiri acara santap malam US-ASEAN Summit di Sunnylands Historic Home pada tanggal 15 Februari 2016, yang dihadiri oleh para Kepala Negara ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Bagian dari komitmen tersebut adalah kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI untuk membicarakan Palestina dan Al Quds Al Sharif pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 di Jakarta. Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada tanggal 3 Februari 2016 di Istana Kepresidenan. (Jalan Panjang dukungan RI untuk Kemerdekaan Palestina melalui [<http://www.presidentri.go.id/internasional/jalan-panjang-dukungan-ri-untuk-kemerdekaan-palestina.html>] <28/02/2015>).

## **5.2. Kepentingan**

Penulis belum melihat kepentingan langsung Indonesia terhadap Palestina tetapi Indonesia memiliki kepentingan di kawasan Timur-Tengah. Menempatkan Islam dalam kebijakan luar negeri, menurut penulis memiliki keuntungan tersendiri. Pertama, karena Islam dan perpaduannya dengan demokrasi, Dunia Barat menaruh perhatian terhadap Indonesia. Kedua, Islam dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk lebih mendekatkan hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Dunia Barat dan Timur Tengah adalah dua entitas yang akan menguntungkan jika kita dapat menjalin hubungan baik dengan mereka, karena kita tahu bahwa sebagian besar negara di Dunia Barat adalah negara maju dan sebagian besar negara di Timur Tengah adalah negara-negara penghasil minyak, yang merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini. Akan tetapi, untuk dapat meraih dua keuntungan tersebut Indonesia memiliki beberapa tantangan, yaitu, yang pertama, membuktikan bahwa betul di Indonesia demokrasi dan islam berjalan selaras, dan yang kedua, untuk meningkatkan posisi di Dunia Islam, Indonesia setidaknya memiliki kondisi domestik yang kondusif, juga terkait dengan ekonomi dan SDM yang harus terus meningkat secara kualitas (Sihbudi, 1997: 41).

Indonesia melihat wilayah Timur Tengah dapat dilihat dari berbagai sudut dan kepentingan. Pertama, Timur Tengah merupakan wilayah tempat

turunnya agama-agama Allah seperti Kristen dan Islam sehingga mayoritas orang Indonesia sangat menghormati tempat-tempat tertentu di wilayah itu. Kedua, sebagai wilayah kaya minyak, negara-negara Timur Tengah memiliki perekonomian yang kuat sehingga perlu didekati untuk membantu ekonomi kita. Ketiga, orang-orang kaya Timur Tengah perlu tenaga kerja nonformal yang bisa dipasok dari Indonesia. Upaya menarik pengusaha asal Timur Tengah agar berinvestasi di Indonesia ataupun membeli barang produksi Indonesia masih sebatas pernyataan dan kesepakatan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga berkepentingan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di Timur-Tengah yang kerap mengalami penyiksaan dan pelecehan (Sihbudi, 1997: 40). Dari uraian tersebut kita melihat kepentingan Indonesia lebih ke kawasan yang terkait dengan kepentingan untuk mendapat pengakuan Negara-negara di Timur-Tengah, kepentingan ekonomi serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Negara-negara kawasan Timur-Tengah.

## **6. SIMPULAN**

Pemerintah Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016. Kegiatan tersebut mencerminkan identitas Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dimana menurut perspektif konstruktivis perilaku dan kepentingan Negara dipengaruhi oleh identitas yang merupakan hasil pemaknaan suatu Negara berdasarkan preferensi internal dan eksternal. Identitas Islam terwujud dalam kepentingan Indonesia untuk mendapat pengakuan, kepentingan ekonomi serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Negara-negara kawasan Timur-Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulgani, Ruslan. 1978. *Hubungan Indonesia dengan Mesir dan Timur Tengah Sepanjang Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, Paterson, M., True, J. 2005. *Theories of international relations 3<sup>rd</sup> edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Djalal, Hasyim. 1990. *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990 Cetakan Pertama*. Jakarta: CSIS.

- Fox, James J. 2004. "Currents in Contemporary Islam in Indonesia," *Harvard Asia Vision 21*. Cambridge.
- Held, David. 1995. *Democracy at the Global Order*. Oxford: Oxford University Press.
- Plano, Jack., C, Olton., Roy. 1978. *The International Relations Dictionary*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Rahmat, Musthafa, A. 2002. *Jejak-jejak Juang Palestina Cetakan Pertama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Renner, Judith&Horelt, Michel-Andre. 2008. Of Heroes and Villains: Competing Identity Construction in Post – War Croatia. *Munich Working Papers in IR. No.1 (January 2008)*.
- Sihbudi, M., R. 1997. *Indonesia Timur Tengah: masalah dan prospek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sihbudi, M., R. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: Hikmah
- Thorun, Christian Thorun. 2009. *Explaining Change in Russian Foreign Policy*. US: Palgrave MacMillan.
- Wendt, Alexander. 1994. Collective Identity Formation and the International State. *American Political Science Review 88 (1994)*.
- Dave McRae, "More Talk Than Walk: Indonesia as A Foreign Policy Actor, melalui  
[[http://www.lowyinstitute.org/files/mcrae\\_more\\_talk\\_web\\_0.pdf](http://www.lowyinstitute.org/files/mcrae_more_talk_web_0.pdf)]  
<28/02/2016>
- Indonesia akan Gelar KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif melalui  
[<http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-akan-gelar-KTT-Luar-Biasa-OKI.aspx>] <28/02/2016>
- Indonesia Menjadi Model Bagi Hubungan Islam dan Demokrasi melalui  
[/www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/169-maret-2012/1368-indonesia-menjadi-model-bagi-hubungan-islam-dan-demokrasi.html](http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/169-maret-2012/1368-indonesia-menjadi-model-bagi-hubungan-islam-dan-demokrasi.html)  
<28/02/2016>

Isi Pidato Lengkap Jokowi di COP21 Paris melalui [<https://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/30/078723604/ini-isi-pidato-lengkap-jokowi-di-cop21-paris>] <28/02/2015>

Jalan Panjang dukungan RI untuk Kemerdekaan Palestina melalui [<http://www.presidentri.go.id/internasional/jalan-panjang-dukungan-ri-untuk-kemerdekaan-palestina.html>] <28/02/2015>

Tentang KTT Luar Biasa Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif melalui [<https://www.oic-es2016.id/?p=about>] <28/02/2016>

Warga Nahdlatul Ulama, [<http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,9-t,basis+pendukung-.phpx.>] <28/02/2016>

